



Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis (JDAB) *Journal of Accounting and Business Dynamics*

URL: <http://jurnal.unsyiah.ac.id/JDAB/index>



Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah, Diferensiasi Fungsional Dan Spesialisasi Fungsional Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Suparno^a dan Riska Nanda^b

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala

Corresponding author: suparno.feakt@unsyiah.ac.id^a, 02fildzah@gmail.com^b

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRACT

Article history:

Received 25 Augst 2016

Received in revised form 12 September 2016

Accepted 22 September 2016

Available online 28 October 2016

Keywords:

effectiveness of the regional financial information system, management information system, userparticipation, clarity of purpose, organizational culture

The purpose of this study was to examine the effect of local financial independence , functional differentiation and functional specialization of the level of mandatory disclosure of financial statements of local government . The average level of mandatory disclosure of the financial statements of local government in regencies/ cities in Aceh amounted to 48.65 % . The data used are secondary data from the financial statements of the second level governments . Total population in this study were 23 regencies/ cities in Aceh 2013-2014 fiscal year . Statistical method used to test the hypothesis is multiple linear regression . The results showed that, simultaneously local financial independence, functional differentiation and functional specialization affect the level of mandatory disclosure of financial statements of local government. Partially local financial independence affects the level of mandatory disclosure of financial statements of local government, functional differentiation affects the level of mandatory disclosure of financial statements of local government, and functional specialization affect the level of mandatory disclosure of financial statements of local government.

2016 FEB USK. All rights reserved.

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pemerintah wajib menyusun pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mewajibkan bagi presiden dan gubernur/walikota/bupati untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan

keuangan. Laporan keuangan pemerintahan daerah disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan (PP No. 24 tahun 2005 dalam

pelaksanaan Pasal 184 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004).

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar akuntansi pemerintahan dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Pemerintah wajib mengungkapkan laporan keuangannya sebagai pertanggungjawaban memberikan informasi

mengenai transparansi pelaporan keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat.

Pengungkapan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah PP No. 24 tahun 2005, terdapat 264 item yang harus diungkapkan. Terdapat 11 pernyataan standar akuntansi pemerintah (PSAP) dalam standar akuntansi pemerintahan. Pengungkapan minimal yang dipersyaratkan dalam PSAP diantaranya pada akun-akun yang tercantum dalam neraca, yaitu PSAP Nomor 5 sampai PSAP Nomor 11. Sebagai contohnya persentase tingkat pengungkapan laporan keuangan daerah beberapa kabupaten/kota di Aceh dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1
Data Persentase Tingkat Pengungkapan LKPD

NO	Entitas	Jumlah item yang di Ungkapkan dan Persentasenya			
		Tahun 2013		Tahun 2014	
1	Aceh Timur	113 item	43%	121 item	46%
2	Bireun	130 item	49%	124 item	47%
3	Lhokseumawe	107 item	40,5%	107 item	40,5%

Sumber: Data LHP BPK(2013-2014)

Dari table 1.1 dapat disimpulkan bahwa tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di Aceh masih sangat rendah. Pada tahun 2013 dan 2014 rata-rata tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di Aceh 40% sampai 49%. Ini menandakan masih rendahnya tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di Aceh yang sesuai SAP dan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan survei literatur, ada beberapa faktor yang diduga berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan diantaranya, rasio kemandirian pemerintah daerah (Suhardjanto dan Lesmana 2010, Setyaningrum dan Syafitri 2012), diferensiasi fungsional dan spesialisasi fungsional (Setyaningrum dan Syafitri 2012). Variabel pertama yang mempengaruhi pada tingkat pengungkapan laporan keuangan adalah kemandirian keuangan pemerintah daerah. Variabel ini diduga salah satu faktor yang berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan.

Variabel terakhir yang mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan adalah spesialisasi fungsional. Penelitian Patrick (2007)

menemukan bahwa Pemda dengan perangkat daerah yang memiliki spesialisasi pekerjaan di bidang pelaporan keuangan/akuntansi akan lebih besar keinginannya untuk mengadopsi Governmental Accounting Standards Board (GASB) 34. Kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dituntut untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Berdasarkan uraian atas fenomena dan penelitian sebelumnya yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti tertarik melakukan sebuah penelitian dengan judul “Pengaruh Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah, Temuan Audit, Diferensiasi Fungsional Dan Spesialisasi Fungsional Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Apakah kemandirian keuangan daerah, Jumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD), Latar belakang pendidikan Kepala Daerah berpengaruh bersama-sama terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD.
- 2) Apakah kemandirian keuangan daerah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.
- 3) Apakah diferensiasi fungsional berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.
- 4) Apakah spesialisasi fungsional berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas maka penelitian ini dilakukan untuk:

- 1) Untuk mengetahui pengaruh kemandirian keuangan daerah, Jumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD), Latar belakang pendidikan Kepala Daerah berpengaruh bersama-sama terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh kemandirian keuangan daerah terhadap tingkat

pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

- 3) Untuk mengetahui pengaruh diferensiasi fungsional terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.
- 4) Untuk mengetahui pengaruh spesialisasi fungsional terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Apakah terdapat pengaruh manajemen sistem informasi, partisipasi pemakai, kejelasan tujuan dan budaya organisasi terhadap efektivitas sistem informasi keuangan daerah.
- 2) Apakah terdapat pengaruh manajemen sistem informasi terhadap efektivitas sistem informasi keuangan daerah.
- 3) Apakah terdapat pengaruh partisipasi pemakai daerah terhadap efektivitas sistem informasi keuangan daerah.
- 4) Apakah terdapat pengaruh kejelasan tujuan terhadap efektivitas sistem informasi keuangan daerah.
- 5) Apakah terdapat pengaruh budaya organisasi terhadap efektivitas sistem informasi keuangan daerah.

2. Kerangka Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

2.1 Pengungkapan (Disclosure)

Menurut Na'im dan Rakhman (2000) pengungkapan dapat didefinisikan secara sederhana sebagai pengeluaran informasi (the releas of information). Suropto (1999) pengungkapan (disclosure) berkaitan dengan cara penjabaran atau penjelasan hal-hal informatif yang dianggap penting dan bermanfaat bagi pemakai selain apa yang dapat dinyatakan melalui statement keuangan utama.

Secara umum, tujuan pengungkapan adalah menyajikan informasi yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan untuk melayani berbagai pihak yang mempunyai kepentingan berbeda-beda. Pengungkapan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah PP No. 24 tahun 2005, terdapat 264 item yang harus di ungkapkan.

Adapun Tujuan, konsep dan jenis pengungkapan menurut (Peraturan Pemerintah no 24 Tahun 2005):

A. Tujuan Pengungkapan Laporan keuangan Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- 1) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- 2) Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya
- 3) Ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- 4) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- 5) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- 6) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
- 7) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

B. Konsep Pengungkapan

Ada tiga konsep pengungkapan yang umumnya diusulkan, yaitu:

- 1) Pengungkapan Cukup yaitu pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku.
- 2) Pengungkapan Wajar
Pengungkapan yang wajar secara tidak langsung merupakan tujuan etis agar memberikan perlakuan yang sama kepada semua pemakai laporan keuangan menyediakan informasi yang layak terhadap pembaca potensial.
- 3) Pengungkapan Penuh

Menyangkut kelengkapan penyajian informasi yang diungkapkan secara relevan.

C. Jenis Pengungkapan

1. Pengungkapan Wajib (mandatory disclosure)
2. Pengungkapan Sukarela (voluntary disclosure)

2.2 Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiyai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang di perlukan daerah (Halim, 2002). Kemandirian keuangan daerah bertujuan untuk mengukur kemampuan suatu Pemerintah Daerah untuk tetap dapat menjalankan kegiatan operasionalnya tanpa adanya dana perimbangan dari pemerintah pusat (Dwirandra, 2008).

Lesmana (2010) menemukan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD. Semakin tinggi rasio ini berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal semakin rendah. Rasio ini juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah (Dwirandra, 2008).

2.3 Diferensiasi Fungsional

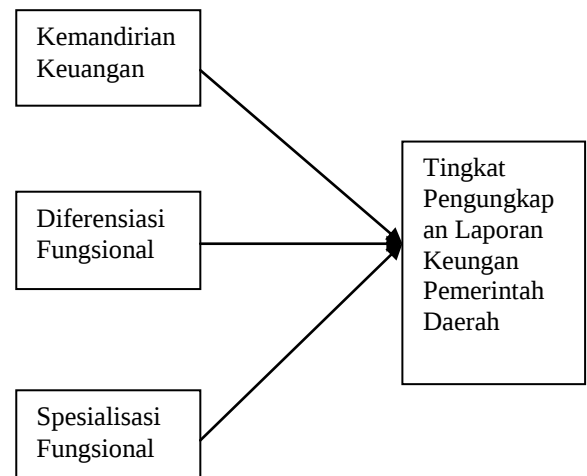
Diferensiasi fungsional menunjukkan sejauh mana sebuah organisasi dibagi menjadi departemen fungsional. Patrick (2007) menemukan bahwa Pemerintah daerah di Pennsylvania dengan tingkat diferensiasi fungsional yang lebih tinggi akan cenderung untuk lebih mengadopsi GASB 34 (Governmental Accounting Standards Board) dibandingkan dengan yang tingkat diferensiasi fungsionalnya rendah.

SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) merepresentasikan diferensiasifungsional di pemerintahan Indonesia. Pemerintah daerah dibagi menjadi beberapa diferensiasi fungsional atau sub unit yang berbeda, yang disebut dengan SKPD (Suhardjanto et al., 2010). SKPD memiliki kedudukan sebagai unsur pembantu kepala daerah.

2.4 Spesialisasi Fungsional

Spesialisasi pekerjaan biasanya diukur menurut tingkat pendidikan formal. Patrick (2007) menemukan bahwa Pemda dengan perangkat daerah yang memiliki spesialisasi pekerjaan dibidang pelaporan keuangan/akuntansi akan lebih besar keinginannya untuk mengadopsi Governmental Accounting Standards Board (GASB) 34. Suhardjanto et al. (2010) menyatakan bahwa latar belakang pendidikan bupati merupakan prediktor yang signifikan terhadap kepatuhan pengungkapan SAP yang wajib.

Sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah dituntut untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Kepala daerah dan atau wakil kepala daerah yang memiliki latar belakang ekonomi atau akuntansi akan lebih mudah dalam memahami dan menerapkan standar akuntansi pemerintahan dalam penyajian laporan keuangannya, sehingga laporan keuangannya menyajikan informasi yang dibutuhkan para pengguna laporan keuangan.



Gambar 1
Skema Kerangka Pemikiran

2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran tersebut, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H1 :Rasio kemandirian keuangan daerah, Jumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD), Latar belakang pendidikan Kepala Daerah berpengaruh bersama-sama terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD.

H2 :Rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD.

H3 :Diferensiasi Fungsional berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD.

H4 :Spesialisasi Fungsional berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD.

3. Metode Penelitian

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kemandirian keuangan pemerintah daerah, diferensiasi fungsional, dan spesialisasi fungsional sebagai variabel independen terhadap variabel dependen tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah. Sesuai dengan tujuan penelitian, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengujian hipotesis.

Penelitian ini menggunakan studi kausal. Penelitian ini dilakukan dengan intervensi minimum Situasi studi dalam penelitian ini adalah situasi tidak diatur. Unit analisis dalam penelitian ini adalah pemerintah kabupaten/kota. Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam penelitian ini horizon waktu yang digunakan adalah perpaduan time series dan cross sectional atau dikenal dengan data pooling (pooled data).

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Aceh, dengan tahun pengamatan yang diambil dari tahun 2013 sampai dengan 2014. Total populasi dalam penelitian ini berjumlah 24 kabupaten/kota di Aceh . Metode pengambilan sampel pada penelitian ini adalah dilakukan secara sensus, yang berarti semua populasi sampel yang akan diteliti diambil (Sekaran dan Bougie,2010).

3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder.. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumen yang dipublikasikan). Data-data yang dibutuhkan sebagai pengukuran variabel penelitian bersumber dari:

1. Laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2013 dan 2014 yang telah di audit BPK LHP buku I, yaitu laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Dari keempat laporan tersebut mendapatkan data mengenai kemandirian keuangan pemerintah daerah, diferensiasi fungsional, dan spesialisasi fungsional.
2. Data latar belakang kepala daerah berserta wakilnya,yang diakses dari situs resmi masing masing daerah.
3. Peraturan pemerintah PP No. 24 Tahun 2005
4. Standar akuntansi pemerintahan.
5. Jurnal jurnal dan referensi lainnya dari berbagai sumber.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara dokumentasi. Data diperoleh dari BPK Aceh. Data yang digunakan adalah data laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

3.4 Operasionalisasi Variabel

3.4.1 Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen ialah tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kabupaten/kota tahun 2013 sampai dengan 2014.

Tingkat pengungkapan LKPD yang dimaksud adalah perbandingan antara pengungkapan yang telah disajikan dalam LKPD dengan pengungkapan yang seharusnya disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan menurut Standar.

Akuntansi Pemerintahan (SAP). Tingkat pengungkapan LKPD ini menggambarkan seberapa besar pengungkapan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dibandingkan dengan pengungkapan yang seharusnya disajikan. Oleh karena itu, pada penelitian Setyaningrum dan Syafitri (2012) tingkat pengungkapan LKPD dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah item yang diungkapkan}}{\text{Total item yang harus diungkapkan}}$$

Dalam penelitian ini, tingkat pengungkapan LKPD yang dilakukan adalah dengan menggunakan sistem scoring. Sistem scoring yang dimaksud adalah dengan membuat daftar checklist pengungkapan yang diwajibkan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan. Checklist pengungkapan yang diwajibkan terdapat sebanyak 264 butir item pengungkapan. Mekanisme pengukuran tingkat pengungkapan LKPD adalah:

1. Membuat daftar pengungkapan berdasarkan SAP dan Menjumlahkan nilai-nilai yang didapat untuk setiap LKPD.
2. Menghitung tingkat pengungkapan dengan membagi jumlah nilai yang diperoleh dengan nilai maksimum yang seharusnya diperoleh jika melakukan pengungkapan penuh.

3.4.2 Variabel Independen (X)

Variabel bebas adalah variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel lain atau variabel terikat. Pada penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah kemandirian keuangan daerah, temuan audit, diferensiasi fungsional dan spesialisasi fungsional.

1. Kemandirian Keuangan Daerah (X1) ialah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari jumlah pendapatan asli daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah maka Pemerintah Daerah cenderung untuk berusaha memenuhi pengungkapan pada LKPD karena tuntutan terhadap transparansi atas pengungkapan pelaporan keuangan semakin tinggi. Pengukuran kemandirian keuangan daerah dalam penelitian ini dengan cara membandingkan pendapatan asli daerah dengan total pendapatan transfer dan total kewajiban.
2. Diferensiasi Fungsional (X2) Pada penelitian Patrick (2007) menemukan bahwa Pemerintah Daerah di Pennsylvania dengan tingkat diferensiasi fungsional yang lebih tinggi akan cenderung untuk lebih mengadopsi GASB 34 dibandingkan dengan yang tingkat diferensiasi fungsionalnya rendah. Dalam struktur pemerintahan daerah, pembagian departemen

fungsional atau subunit disebut dengan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Pada penelitian Setyaningrum dan Syafitri 2012 pengukuran diferensiasi fungsional menggunakan jumlah SKPD sebagai proksi untuk mengukur diferensiasi fungsional.

3. Spesialisasi Fungsional (X3) sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah dituntut untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Kepala daerah yang memiliki latar belakang akuntansi akan lebih mudah dalam memahami dan menerapkan standar akuntansi pemerintahan dalam penyajian laporan keuangannya sehingga dapat menyajikan informasi yang dibutuhkan para pengguna laporan keuangan. Latar belakang kepala daerah ini merupakan variabel dummy, apabila latar belakang kepala daerah dan atau wakil kepala daerah berasal dari bidang ekonomi akan diberi nilai 1, tetapi jika tidak berasal dari bidang ekonomi akan diberi nilai 0.

3.5 Model Analisis dan Metode Pengujian Data

3.5.1 Model Analisis

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Dimana :

- Y = Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 a = Konstanta
 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien Regresi
 X_1 = Kemandirian keuangan daerah
 X_2 = Diferensiasi Fungsional
 X_3 = Spesialisasi Fungsional
 ε = Epsilon (error term)

3.5.2 Metode Pengujian Data

• Uji Asumsi Klasik

Asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui kelayakan penggunaan model regresi dalam penelitian ini. Uji asumsi klasik terdiri atas uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas (Ghozali, 2009).

- **Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid (Ghozali, 2009). Menurut Ghozali (2009:147) model regresi yang baik adalah data yang berdistribusi normal atau mendekati normal. Dalam penelitian ini untuk mendeteksi apakah data berdistribusi normal atau tidak menggunakan Komogrov-Smirnov. Uji Kolmogorov-Smirnov dilakukan dengan membuat hipotesis (Ghozali, 2007).

H_0 : data residual berdistribusi normal

H_a : data residual tidak berdistribusi normal

Apabila angka probabilitas $< \alpha = 0,05$ artinya data tersebut distribusinya tidak normal. Sebaliknya, jika angka probabilitas $> \alpha = 0,05$ maka H_a ditolak yang berarti variabel terdistribusi secara normal (Sekaran dan Bougie, 2010).

- **Uji Multikolineritas**

Uji multikolineritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen. Multikolineritas dapat dilihat dari (1) nilai toleran dan lawannya, (2) variance inflation factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel independen terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolineritas adalah Tolerance < 0.10 atau sama dengan VIF > 10 (Ghozali, 2009).

- **Uji Heteroskedastisitas**

Tujuan pengujian ini adalah untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika

varian residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas, Ghozali (2009). Dalam penelitian ini cara untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas, yaitu dengan menggunakan metode grafik dan metode uji statistik (Ghozali, 2009).

Metode Grafik Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED. Dasar analisis :

- 1) jika pada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur, maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas
- 2) jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y secara acak, maka tidak terjadi heteroskedastisitas atau model homoskedastisitas (Ghozali, 2009).

Model Statistik Model statistik yang digunakan untuk menguji adanya heteroskedastisitas dalam penelitian ini adalah dengan melakukan uji glejser. Dimana Glejser mengusulkan untuk meregres nilai absolute residual (AbsUi) terhadap variabel independen lainnya. Jika β signifikan, maka mengindikasikan terhadap heteroskedastisitas dalam model.

- **Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi bertujuan apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu atau residual pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Cara mendeteksinya adanya autokorelasi yaitu dengan run test (Ghozali, 2009). Run test sebagai bagian dari statistik non-parametrik dapat pula digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Jika antara residual tidak terdapat hubungan korelasi, maka dikatakan bahwa residual adalah acak atau random. Run test digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak. Hipotesis yang

diajukan adalah sebagai berikut (Ghozali, 2009): H_0 : residual (res_1) random(acak) H_1 : residual (res_1) tidak random.

3.6 Pengujian Hipotesis

3.6.1 Pengujian secara bersama-sama

Uji statistik F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang dimasukkan ke dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2009). Uji statistik F dilakukan dengan cara quick look, yaitu melihat nilai signifikansi F pada output hasil regresi dengan significance level 0,05 ($\alpha = 5\%$). Dasar pengambilan keputusannya adalah:

- 1) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau jika nilai $Sig\ F > 0,05$, maka hipotesis diterima.
- 2) Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau jika nilai $Sig\ F < 0,05$, maka hipotesis ditolak.

3.6.2 Pengujian Secara parsial

Uji statistik t digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial (Ghozali, 2007). Pengujian dilakukan dengan menggunakan significance level 0,05 ($\alpha = 5\%$). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Jika nilai signifikansi $t > 0,05$ maka hipotesis ditolak. Hal ini berarti, secara parsial variabel independen tidak pengaruh terhadap variabel dependen.
- 2) Jika nilai signifikansi $t < 0,05$ maka hipotesis diterima. Hal ini berarti, secara parsial variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.

Adapun rancangan pengujian hipotesis secara parsial, yakni dengan merumuskan hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_a):

Hipotesis I

$H_{a1}: \beta_1 \neq 0$, Kemandirian keuangan daerah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

$H_{01}: \beta_1 = 0$, Kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

Hipotesis II

$H_{a2}: \beta_2 \neq 0$, Diferensiasi fungsional berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

$H_{02}: \beta_2 = 0$, Diferensiasi fungsional tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

Hipotesis III

$H_{a3}: \beta_3 \neq 0$, Spesialisasi fungsional berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

$H_{03}: \beta_3 = 0$, Spesialisasi fungsional tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

3.6.3 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali 2009:15). Nilai koefisien determinasi berada antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel terikat.

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel bebas, maka R^2 pasti meningkatkan tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat atau tidak. Oleh karena itu, banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai Adjusted R^2 pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik. Tidak seperti R^2 , nilai Adjusted R^2 dapat naik atau turun apabila satu variabel bebas di tambahkan ke dalam model (Ghozali, 2009).

4 Hasil Penelitian Dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian

Tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Aceh tahun anggaran 2013 dan 2014 berdasarkan standar akuntansi pemerintah PP No.24 Tahun

2005 mulai mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2013 tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah yang mengalami peningkatan ialah Kabupaten Pidie sebesar 65% dengan item yang diungkapkan 172 item. Dan tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah yang mengalami penurunan ialah Kota Sabang sebesar 40% dengan item yang diungkapkan 106 item.

Pada tahun 2014 tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebanyak 12 Kabupaten/Kota. Tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebanyak 11 Kabupaten/Kota. Tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah yang mengalami peningkatan sebesar 65% oleh Kabupaten Bireuen dan mengalami penurunan sebesar 38% oleh Kabupaten Aceh Tenggara. Hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan dalam pengungkapan keuangan pemda, dimana pemerintah daerah terus memperbaiki kualitas laporan keuangannya. Tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2013-2014. Penelitian ini meneliti tiga variabel independen yaitu kemandirian keuangan daerah, diferensiasi fungsional dan spesialisasi fungsional terhadap variabel dependen tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan daerah. Variabel independen pertama yaitu kemandirian keuangan daerah.

Rasio kemandirian keuangan daerah yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebanyak 19 Kabupaten/Kota. Sedangkan rasio kemandirian keuangan daerah yang mengalami penurunan sebanyak 4 Kabupaten/Kota. Peningkatan yang terjadi pada rasio kemandirian keuangan daerah sebesar 50,69 yang dimiliki oleh Kabupaten Pidie dan nilai kemandirian keuangan daerah yang mengalami penurunan sebesar 1,170 yang dimiliki oleh Kabupaten Aceh Tamiang.

Diferensiasi fungsional dari jumlah satuan perangkat kerja daerah. Nilai diferensiasi fungsional tertinggi sebesar 65 yang dimiliki oleh Kabupaten Aceh Utara dan yang terendah sebesar 24 yang dimiliki oleh Kabupaten Pidie Jaya. Spesialisasi fungsional Terdapat 13 Kabupaten/Kota di Aceh yang kepala

daerah/wakil kepala daerah memiliki latar belakang di bidang pelaporan/ ekonomi dan terdapat 10 Kabupaten/Kota di Aceh yang kepala daerah/wakil kepala daerah tidak memiliki latar belakang di bidang pelaporan/ekonomi. Secara jelasnya mengenai deskriptif data penelitian dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2
Statistik Deskriptif

	N	Min	Max
Tingkat Pengungkapan	46	38	65
Kemandirian Keuangan	46	1,17	50,69
Diferensiasi Fungsional	46	24	65
Spesialis Fungsional	46	0	1

Sumber: Data diolah

Tabel 3

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		46
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	4,97156685
Most Extreme Differences	Absolute	,129
	Positive	,129
	Negative	-,068
Kolmogorov-Smirnov Z		,873
Asymp. Sig. (2-tailed)		,431

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan tabel 3, diperoleh nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,431 ini berarti bahwa data terdistribusi secara normal karena nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* > 0,05 (Ghozali, 2006:114). Setelah variabel terdistribusi normal maka data tersebut dapat digunakan untuk menguji statistik lainnya.

4.1.1 Pengujian Asumsi Klasik Pengujian Multikolonieritas

Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai VIF dan nilai tolerance dari masing-masing variabel, yaitu Kemandirian Keuangan Daerah, Diferensiasi Fungsional, Spesialisasi Fungsional. Nilai tolerance semua variabel menunjukkan nilai lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa model regresi tersebut terbebas dari multikolonieritas antar variabel bebas.

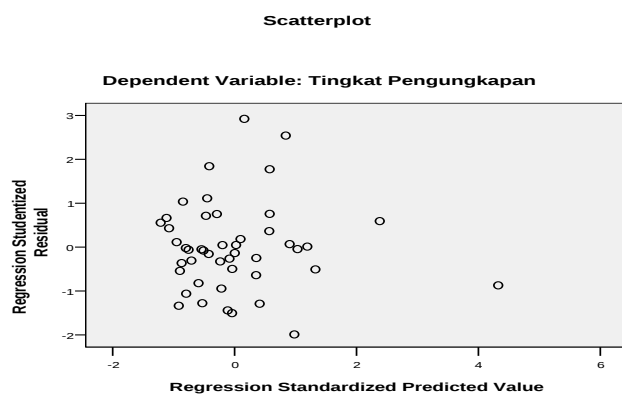
Tabel 4
Statistik Multikolonieritas

Model	Collinearity Statistic	
	Tolerance	VIF
(constant)		
Kemandirian Keuangan	.901	1.110
Diferensiasi Fungsional	.783	1.278
Spesialisasi Fungsional	.714	1.401

Durbin Watson = 2,050

Pengujian Heterokedastisitas

Uji scatterplot digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas. Hasilnya dapat dilihat pada Gambar 2 yang menunjukkan bahwa grafik scatterplot tersebut, dapat diketahui bahwa titik data menyebar secara acak serta tersebar diatas maupun di bawah 0 pada sumbu Y. hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi dalam penelitian ini.



Gambar 2
Diagram Scatterplot

Pengujian Autokorelasi

Autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji statistik Durbin-Watson. Menurut Ghazali (2011:110) uji autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah model regresi linear ada korelasi kesalahan pengganggu antara periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi harus dilihat nilai uji Durbin-Watson sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa pada tingkat signifikansi 5% untuk 23 sampel (n) nilai dU = 1,6597 dan 4-dU = 2,3403. Nilai Durbin Watson 2,050 sehingga $1,6597 < 2,050 < 2,3403$, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi pada data tersebut

4.1.2 Hasil Regresi Linier Berganda

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menguji hipotesis yang menggunakan metode analisis regresi linier berganda (multiple regression analysis), metode regresi linier berganda menghubungkan satu variabel dependen dengan beberapa variabel independen dalam suatu model penelitian untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis linier berganda digunakan untuk mendapat koefisien regresi yang akan menentukan apakah hipotesis yang dibuat akan diterima atau ditolak atas dasar hasil analisis regresi dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5%.

Tabel 5
Hasil Regresi Linear Berganda

Variabel	B	Std error
Constant	40,99	4,166
Kemandirian Keuangan	0,437	0,098
Diferensiasi Fungsional	0,029	0,078
Spesialisasi Fungsional	3,663	1,812
Koefisien Korelasi (R) = 0,665		
Koefisien Determinasi (R ²) = 0,443		
Adjusted (R ²) = 0,403		
F = 11,130		
Sig. .000		

a. Predictors: (constant), Spesialisasi fungsional, kemandirian Keuangan
jumlah SKPD
b. dependent variable: Tingkat Pengungkapan

Nilai koefisien regresi masing-masing variabel independen, kemandirian keuangan daerah, diferensiasi fungsional, dan spesialisasi fungsional dan untuk variabel dependen tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah dapat dilihat pada Tabel 5.

Persamaan regresi linier berganda dengan pengukuran tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah yang diperoleh berdasarkan hasil perhitungan statistik seperti yang terlihat pada tabel 5 adalah:

$$Y = 40,990 + 0,437 X_1 + 0,029 X_2 + 3,663 X_3 + \varepsilon$$

Berdasarkan persamaan regresi tersebut dapat diketahui bahwa:

- 1) Konstanta (α) sebesar 40,990. Artinya, jika kemandirian keuangan daerah, diferensiasi

fungsional, dan spesialisasi fungsional dianggap konstan, maka besarnya tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah adalah sebesar 40%.

- 2) Koefisien regresi kemandirian keuangan daerah yang dinotasikan dengan X_1 bernilai positif sebesar 0,437, artinya setiap peningkatan satu satuan kemandirian keuangan daerah maka akan meningkatkan jumlah tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 43,7%
- 3) Koefisien regresi diferensiasi fungsional yang dinotasikan dengan X_2 bernilai positif sebesar 0,029 artinya setiap peningkatan satu satuan diferensiasi fungsional maka akan meningkatkan jumlah tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 29%
- 4) Koefisien regresi spesialisasi fungsional dinotasikan X_3 bernilai positif sebesar 3,663, artinya setiap peningkatan satu satuan spesialisasi fungsional maka akan meningkatkan jumlah tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 3,66%

4.1.3 Pengujian Hipotesis

4.1.3.1 Pengujian Hipotesis 1

Uji statistik F ini dilakukan untuk menguji apakah model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model yang layak (fit) atau tidak dan juga untuk menentukan diterima atau ditolaknya hipotesis untuk pengaruh secara simultan. Berdasarkan hasil uji statistik nilai F-Hitung yang dapat dilihat pada tabel 4.4, variabel dependen tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 11,130 dengan signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai 0,05 (5%) dan nilai F-Tabel sebesar 3.13. hal ini menunjukkan $F\text{-hitung} > F\text{-Table}$. Dengan demikian model yang digunakan untuk menguji tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah adalah model yang fit, sehingga hipotesis pertama (H_1) yang merupakan kemandirian keuangan daerah, diferensiasi fungsional dan spesialisasi fungsional terhadap tingkat Pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah dapat diterima.

4.1.3.2 Pengujian Hipotesis 2

Variabel kemandirian keuangan daerah memiliki nilai (β) koefisien regresi sebesar 0,437. Hasil uji regresi linier berganda untuk pengujian hipotesis 2 dapat dilihat pada Tabel 5 Apabila $H_{a2}:\beta_2 \neq 0$, kemandirian keuangan daerah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Apabila $H_{02}:\beta_2 = 0$, Kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Koefisien regresi kemandirian keuangan daerah sebesar 0,437 maka $H_{a2}:\beta_2 \neq 0$ ini menunjukkan bahwa H_{a2} diterima dan H_{02} ditolak. Kemandirian keuangan daerah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan daerah. Dengan demikian, hipotesis kedua (H_2) yang menyatakan bahwa kemandirian keuangan daerah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan daerah diterima.

4.1.3.3 Pengujian Hipotesis 3

Variabel diferensiasi fungsional memiliki nilai (β) koefisien regresi sebesar 0,029. Apabila $H_{a3}:\beta_3 \neq 0$, diferensiasi fungsional berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Jika $H_{03}:\beta_3 = 0$, Diferensiasi fungsional tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Koefisien regresi diferensiasi fungsional sebesar 0,029 maka $H_{a3}:\beta_3 \neq 0$ ini menunjukkan bahwa H_{a3} diterima dan H_{03} ditolak. Hasil uji regresi linier berganda untuk pengujian hipotesis 3 dapat dilihat pada Tabel 5. diferensiasi fungsional berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan daerah. Dengan demikian, hipotesis ketiga (H_3) yang menyatakan bahwa diferensiasi fungsional berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah diterima

4.1.3.4 Pengujian Hipotesis 4

Variabel Spesialisasi Fungsional memiliki nilai (β) koefisien regresi sebesar 3,663. Apabila $H_{a4}:\beta_4 \neq 0$, spesialisasi fungsional berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Jika $H_{04}:\beta_4 = 0$, Spesialisasi fungsional tidak berpengaruh terhadap tingkat

pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Koefisien regresi spesialisasi fungsional sebesar 3.663 maka $H_{a4}:\beta_4 \neq 0$ ini menunjukkan bahwa H_{a4} diterima dan H_{o4} ditolak. Hasil uji regresi linier berganda untuk pengujian hipotesis 4 dapat dilihat pada Tabel 5 spesialisasi fungsional berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, hipotesis keempat (H_4) yang menyatakan bahwa spesialisasi fungsional berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah diterima.

4.1.4 Koefisien Determinasi

Regresi linier berganda ini dianalisis pula besarnya koefisien determinasi (R^2). Uji koefisien determinasi dalam penelitian ini digunakan untuk melihat besarnya pengaruh variabel independen (kemandirian keuangan daerah, diferensiasi fungsional dan spesialisasi fungsional) terhadap variabel dependen (tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah). Hasil pengujian menunjukkan nilai R^2 seperti terlihat pada Tabel 5

Tabel 5 menunjukkan nilai R^2 untuk variabel dependen tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,403 atau 40,3%. Jadi dapat dikatakan bahwa 40,3% Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Aceh pada tahun 2013-2014 disebabkan oleh Kemandirian Keuangan Daerah, Diferensiasi Fungsional dan Spesialisasi Fungsional, sedangkan 59,7% disebabkan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil regresi linear berganda yang telah diperoleh dalam penelitian ini, maka berikut akan dibahas pengaruh variabel independen yaitu Kemandirian Keuangan Daerah, Diferensiasi Fungsional dan Spesialisasi Fungsional terhadap variabel dependen yaitu Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Daerah.

4.2.1 Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Daerah

Variabel Kemandirian keuangan daerah memiliki nilai β sebesar 0,437. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan daerah. Penelitian ini mendukung penelitian Djoko Suhardjantho dan Sigit Indra Lesmana (2010), yang menemukan pengaruh positif antara kemandirian keuangan daerah terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah.

Kemandirian keuangan daerah bersumber dari dari pendapatan asli daerah dibanding dengan total pendapatan transfer ditambah total kewajiban. kemandirian keuangan daerah mempengaruhi tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan daerah, semakin tinggi kemandirian keuangan daerah berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal semakin rendah. Dengan demikian pemerintah daerah cenderung untuk berusaha melakukan pengungkapan wajib pada laporan keuangannya.

4.2.2 Pengaruh Diferensiasi Fungsional terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Daerah

Variabel diferensiasi fungsional memiliki nilai β sebesar 0,029. Hal tersebut menunjukkan bahwa diferensiasi fungsional berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini mendukung penelitian Patrick (2007) yang menemukan diferensiasi fungsional berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan.

Diferensiasi fungsional dapat dilihat dari jumlah SKPD suatu pemerintah daerah. Apabila suatu pemerintah daerah dengan jumlah SKPD yang lebih tinggi akan lebih mengadopsi Standar Akuntansi Pemerintah untuk pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah.

4.2.3 Pengaruh Spesialisasi Fungsional terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Daerah

Variabel Spesialisasi Fungsional memiliki nilai β sebesar 3,663. Hal tersebut menunjukkan bahwa spesialisasi fungsional berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan daerah. Penelitian ini mendukung penelitian Patrick (2007) menemukan pengaruh positif antara spesialisasi fungsional terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan.

Spesialisasi fungsional dapat diukur dari latar belakang kepala daerah/wakil kepala daerah yang dibidang pelaporan keuangan atau ekonomi. Apabila kepala daerah/wakil kepala daerah yang dibidang pelaporan keuangan atau ekonomi diharapkan akan lebih mudah memahami dan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam penyajian laporan keuangannya.

5 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Kemandirian keuangan daerah, diferensiasi fungsional dan spesialisasi fungsional secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan laporan daerah.
- 2) Kemandirian keuangan daerah secara individual berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan laporan daerah.
- 3) Diferensiasi fungsional secara individual berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan laporan daerah.
- 4) Spesialisasi fungsional secara individual berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan laporan daerah.

Daftar Pustaka

Asmara, Jhon Andra. 2010. Perubahan Alokasi Belanja Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBA) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi* Vol. 3. No Juli 2010 hal.155-172

Balai Pustaka. 2006. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta

Dwirandra. 2008. Efektivitas Dan Kemandirian Keuangan Daerah Otonom Kabupaten/Kota Di Propinsi Bali Tahun 2002-2006.

Ghozali, Imam. 2007. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

_____. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP

Halim, Abdul dan Syam Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.

_____. Abdullah, S. 2006. Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintahan Daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*.

_____. 2002. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

Institut Akuntan Publik Indonesia. 2011. *Standar Profesional Akuntan Publik*, Per 1 Maret 2011. Jakarta: Salemba Empat.

Naim, A dan F. Rakhman. 2000. Analisis Hubungan antara Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan dengan Struktur Modal Dan Tipe Kepemilikan Perusahaan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*. Vol. 15: 70-82

Nordiawan, D., & Hertianti, A. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta Selatan: Salemba Empat

Patrick, Patricia A. 2007. The determinants of organizational innovativeness: The adoption of GASB 34 in Pennsylvania local government. *Ph.D.dissertation*, The Pennsylvania State University, United States-Pennsylvania. Retrieved August 8, 2011, from Accounting & Tax Periodicals. (Publication No. AAT 3266180).

Sekaran, Uma., Roger Bougie. 2011. *Research Method For Business: A Skill Building Approach*. John Wiley & Sons, New York.

_____. 2006. *Research Methods for Business: Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Buku 1 Edisi 4. Terjemahan Kwan Men Yon. Jakarta: Salemba Empat.

Setyaningrum, dan Syafitri. 2012. Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. Vol. 9, No.2, Hal: 154-170

- Suhardjanto, D., dan Lesmana. 2010. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat pengungkapan Wajib Di Indonesia. Universitas Sebelas Maret. ISSN 1411-1497
- _____. Rusmin, Mandasari, P., Brown, A. 2010. Mandatory Disclosure Compliance and Local Government Characteristics: Evidence from Indonesian Municipalities. *Penelitian Hibah Publikasi Internasional*, LP2M UNS.
- _____. Yulianingtyas, R. 2011. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib Dalam laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Universitas Sebelas Maret.
- Sugiyono. 2013. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta
- Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah RI No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- _____. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- _____. 2005. Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- _____. 2004. Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemda
- _____. 2003. Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- _____. 2005. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah
- Waliyyani, dan Mahmud. 2015. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi*. ISSN 2252-6765.
- Zimmerman, J. L. 1977. The Municipal Accounting Maze: An Analysis of Political Incentives. *Journal of Accounting Research*.